



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**N
9**

**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANGGARAI**

KATA PENGANTAR

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai alat kendali, penilaian kuantitatif kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan dalam perpektif yang lebih luas, berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Secara kuantitatif kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Tahun 2019 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari frekwensi prosentase pada analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sebagaimana yang terbaca dalam uraian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Keberhasilan aplikasi kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut merupakan konsekwensi logis dari pada perencanaan strategi yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam upaya pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya faktorperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi.

Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tergambar secara tersirat dalam analisis pengukuran kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor dana, sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ruteng, Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN MANGGARAI, 



ABDUL KALAM, S.H

PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C

NIP. 19620704 199202 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpijak pada Visi, Misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memperhitungkan berbagai kemampuan terutama kemampuan keuangan, maka tahun 2019 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai telah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dari evaluasi penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai Tahun 2019, menunjukkan bahwa dari beberapa kebijakan yang ditetapkan, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sudah menampakkan hasil yang nyata serta berdampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Manggarai ke depan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai selama tahun 2019. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran I Program Kegiatan Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 110 % dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Program Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 25 % dengan kategori “kurang” dengan total rata-rata kedua sasaran adalah **66,25% dengan kategori ‘cukup’**. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta kegiatan sosialisasi 4 kegiatan di 4 kecamatan yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang lebih banyak.

Kami menyadari bahwa ada hambatan-hambatan serta kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuatan Laporan Kinerja ini sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat yang berwenang demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ruteng, Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANGGARAI, 



KEPENGABUT, SH
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C
NIP. 19620704 199202 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA	I
PENGANTAR	
IKHTISAR	ii
EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	Iii
DAFTAR TABEL	Iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.....	1
B. Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	4
C. Struktur Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	9
A. Rencana Strategi Tahun 2016-2021	9
B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019.....	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja	14
B. Evaluasi Dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
BAB IV PENUTUP	32
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. MATRIKS RENCANA STRATEGIS	
2. INDIKATOR KINERJA UTAMA	
3. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019	
4. PERJANJIAN KINERJA 2019	
5. PENGUKURAN KINERJA 2019	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN..... 6
Tabel 2	JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN..... 6
Tabel 3	JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN/ESELONERING..... 7
Tabel 4	TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM TAHUN 2019..... 9
Tabel 5	RENCANA KINERJA TAHUN 2019..... 11
Tabel 6	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019..... 11
Tabel 7	KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN..... 15
Tabel 8	ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA..... 16
Tabel 9	KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH..... 17
Tabel 10	LAPORAN DEMO/AKSI UNJUK RASA 2019..... 24
Tabel 11	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2019 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 1MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN DIALOG YANG KONSTRUKTIF ANTARA ANGGOTA MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DEMI MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA..... 27
Tabel 12	AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 1..... 27
Tabel 13	ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA..... 28
Tabel 14	PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2019 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRATIS (PILPRES, PILKADA, PILEG) DAN KESADARANWARGA NEGARA DALAM BERPARTISIPASI POLITIK..... 30
Tabel 15	AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 2..... 30
Tabel 16	TOTAL HASIL PENGUKURAN KINERJA..... 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat :

1. Dasar hukum berdirinya organisasi

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 10 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas pokok dan fungsi organisasi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Manggarai mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Demokratisasi dan Kebangsaan, Penanganan Masalah Aktual, Perlindungan Masyarakat, Kesiagaan, penanggulangan dan Kesekretariatan berdasarkan asasotonomi dan tugas pembantuan. Dalam Melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Sekretariat;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Demokratisasi dan Kebangsaan;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penanganan Masalah Aktual;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Perlindungan Masyarakat;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Kesiagaan;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Penanggulangan Bencana;
- Pengaturan, pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian Jabatan Fungsional;
- Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

b. Sekretaris mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, urusan Umum dan Kepegawaian serta urusan Keuangan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2.1 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan pedoman/petunjuk Teknis Renstra, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja(PK), LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Bulanan dan laporan lainnya;
- b. Menyusun dan mengolah data Renstra, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Bulanan dan laporan lainnya;
- c. Menyajikan dan membuat KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), LAKIP, LPPD, LKPI, Laporan Bulanan dan laporan lainnya;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan evaluasi program Badan;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk Teknis dibidang tata usaha, surat menyurat dan kearsipan;
- b. Menyusunan dan mengolah data inventaris barang milik negara/daerah
- c. Mengolah urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Mengolah urusan kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

2.3 Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan, pedoman/petunjuk teknis dibidang keuangan;
- b. Menyusun Dokumen Anggaran penerimaan dan pengeluaran sesuai tahapan perencanaan;
- c. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan dan pembuatan laporan;
- d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3. Bidang Demokratisasi dan Kebangsaan mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dibidang Hubungan Antar Lembaga/organisasi, Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Demokratisasi dan Kebangsaan mempunyai fungsi, sbb:

- a. Pelaksanaan kebijakan operasional dibidang ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, desa/ kelurahan dan masyarakat dibidang ketahanan ideologi Negara wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. Peningkatan partisipasi politik dan perlindungan masyarakat dibidang ketahanan ideologi Negara wawasan kebangsaan, bela Negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- d. Pelaksanaan kebijakan operasional kerjasama dibidang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

3.1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi mempunyai tugas :

- Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang hubungan antar lembaga dan organisasi;
- Melaksanakan kerjasama dengan lembaga terkait dibidang Kewaspadaan Dini Masyarakat;

- Melaksanakan kerjasama dengan Lembaga Legislatif, Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum, Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - Melaksanakan tugas interkoneksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya;
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3.2. Sub Bidang Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
- Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
 - Memfasilitasi pelaksanaan PEMILU dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Desa/Kelurahan dibidang Pemilu dan pemantapan wawasan kebangsaan;
 - Memberikan penyuluhan tentang partisipasi politik kepada masyarakat dibidang Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan;
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
4. Bidang Penanganan Masalah Aktual melaksanakan tugas, sbb:
- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dibidang Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya. Dalam melaksanakan tugas bidang Penanganan Masalah Aktual mempunyai fungsi:
- a. Pengidentifikasian masalah aktual dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
 - b. Penanganan masalah aktual dibidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 4.1. Sub Bidang Politik mempunyai tugas :
- Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang politik;
 - Membina pemerintahan di Kecamatan dan Desa/ Kelurahan dibidang Politik;
 - Mendata keberadaan Partai Politik dan memverifikasi persyaratan penerimaan bantuan keuangan bagi Partai Politik;
 - Memberikan izin penelitian dan pemantauan pelaksanaan penelitian;
 - Melaksanakan kerjasama dengan KOMINDA dalam penanganan konflik Partai Politik;
 - Menangani masalah perbatasan, tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing dengan instansi terkait;
 - Menyelenggarakan Pendidikan Politik bagi masyarakat;
 - Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 4.2. Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas :
- Mengumpulkan bahan dan mengolah data penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang ekonomi, sosial dan budaya;
 - Melaksanakan pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investigasi;
 - Melaksanakan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di kecamatan, desa/ kelurahan;
 - Melaksanakan pelatihan aparatur KESBANGPOL&LINMAS dibidang ekonomi dan sosial budaya;

- Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

B. Peran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sbb :

1. Menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Manggarai dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari yang aman dan kondusif. Kenyataan ini tidak berarti bahwa tidak terjadi persoalan, masalah atau pun konflik di Kabupaten Manggarai. Data menunjukkan bahwa masalah atau pun konflik tetap saja terjadi tetapi penanganan konflik diupayakan secepat mungkin baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur mediasi/ fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai.
2. Deteksi dini, tanggap dini dan cegah dini terhadap potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) dengan mengoptimalkan peran dan fungsi KOMINDA, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Antara Umat Beragama (FKUB) sehingga terhindarnya Masyarakat Manggarai dari konflik yang disebabkan oleh Suku, Agama dan Ras (SARA).
3. Pengembangan Wawasan Kebangsaan dalam rangka memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memaknai kembali nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu perlu dimasyarakatkan empat pilar kehidupan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika dengan upaya yang dilakukan adalah dengan mensosialisasikan kegiatan wawasan kebangsaan sehingga adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
4. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
5. Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewajiban untuk membantu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan kegiatan penyuluhan Undang-undang Politik dan Hak-hak Asasi Manusia.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melakukan verifikasi bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Manggarai sesuai regulasi yang ada.
7. Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat memberikan dukungan terhadap Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

C. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu :
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Demokratisasi dan Kebangsaan membawahi 2 Sub Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi;

- Sub Bidang Pemilu dan Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
- d. Bidang Penanganan Masalah Aktual membawahi 2 Sub Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Politik;
 - Sub Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai terlampir.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai didukung oleh pegawai yang terdiri dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil : 16 orang
- b. Tenaga kontrak Daerah : 1 orang

Susunan personalia dapat dilihat pada table 1 sampai dengan table 3 berikut.

Tabel 1

JUMLAH PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
	Sarjana S2	1	
	Sarjana S1	5	1 orang Pensiun Maret 2019
	Diploma	1	
	SLTA	8	
	SLTP	1	
	SD	1	
	TOTAL	17 orang	

Jumlah Pegawai menurut pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2

JUMLAH PEGAWAI MENURUT PANGKAT/GOLONGAN

NO.	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	
	Pembina Tk.I	IV/b	1	Pensiun Maret 2019
	Pembina	IV/a	3	
	PenataTk.I	III/d	4	
	Penata	III/c	1	
	Penata Muda Tk. I	III/b	1	
	Penata Muda	III/a	-	
	Pengatur Tk.I	II/d	2	
	Pengatur	II/c	1	
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1	
	Juru Muda Tk 1	I/b	1	

	Tenaga Kontrak	-	1	
	Jumlah		17 orang	

Jumlah Pegawai menurut Jabatan/ Eselonering dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JABATAN/ESELONERING

NO.	JABATAN/ESELONERING	JUMLAH	KETERANGAN
	Eselon II-b	1 orang	
	Eselon III-a	1 orang	Pensiun Maret 2019
	Eselon III-b	2 orang	
	Eselon IV-a	6 orang	

D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja :

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai selama tahun 2019. Capaian kinerja 2019 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun anggaran. Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai tahun 2019 merupakan jabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2016 - 2021.

Indikator yang ditetapkan atas Rencana Kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar Rencana Kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam bagan sebagai berikut ini :

1. BAB I : Pendahuluan yang memuat : Gambaran Umum, Peran SKPD dalam pelaksanaan Pembangunan, Struktur Organisasi dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II : Perencanaan Strategis, meliputi : Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2019.
3. BAB III : Akuntabilitas Kinerja, yang terdiri dari : Uraian Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.
4. BAB IV : Penutup.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

A. Rencana Strategi Tahun 2016 – 2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2019 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

1. Visi dan Penjelasan Makna Visi.

➤ VISI

Visi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut :

**“MASYARAKAT MANGGARAI YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN KEHIDUPAN
BERPOLITIK YANG DEMOKRATIS”**

2. MISI dan penjelasan makna tiap-tiap Misi

➤ MISI

Misi yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan situasi Keamanan yang Kondusif.
- b. Mewujudkan iklim politik yang demokratis.
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat .

3. Tujuan, Sasaran dan Program.

Tujuan, sasaran dan program tertuang dalam tabel 4 berikut ini

**TABEL 4
TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM TAHUN 2019**

Tujuan	Sasaran	Program
1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan masyarakat.	1.1 Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	1.1.1 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
		1.1.2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		1.1.3 Pemberdayaan Masyarakat

			untuk menjaga ketertiban dan keamanan
2.	Terciptanya kualitas penyelenggaraan demokratis dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.	2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik
		2.1.1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan
		2.1.2	Pendidikan Politik Masyarakat

B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2019

Prosedur penyusunan RKT Tahun 2019 dapat dilihat pada bagan berikut.



Prosedur penyusunan RKT Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai tahun 2019 telah mengikuti prosedur ideal seperti bagan tersebut diatas, yaitu berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja (Renja) / RKT tahun 2019, kemudian dievaluasi dari aspek anggarannya dan disiapkan Rencana Operasional kegiatan tahun 2019. Adapun RKT Tahun 2019 terdapat dalam tabel 5 berikut ini:

**TABEL 5
RENCANA KINERJA TAHUN 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa	1. Kasus yang dimediasi penyelesaiannya 2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	12 kasus 30 kali

2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PILPRES, PILKADA, PILEG) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	1. Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	600 orang
		2. Jumlah peserta sosialisasi politik, Undang-Undang Politik dan HAM.	250 Orang

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

TABEL 6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	a. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 kasus	<u>Program :</u> Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.	157,029,400
				<u>Kegiatan :</u> ➤ <i>Penguatan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat</i>	157,029,400
		b. Jumlah pengamanan tertutup (PAMTUP)	30 Kali	<u>Program :</u> Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	373,870,400
				<u>Kegiatan :</u> ➤ <i>Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam pencegahan tindak criminal</i>	278,872,000
			➤ <i>Pemantauan dan Pengamanan Aktifitas Orang Asing dan Lembaga Asing</i>	17,589,400	

				➤ <i>Monitoring, evaluasi dan pelaporan</i>	77,409,000
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi sasi (PILPRES, PILKADA, PILEG) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	a. Jumlah peserta sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	600 orang	Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan	261,510,400
				Kegiatan : ➤ <i>Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama</i>	136,810,400
				➤ <i>Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat</i>	77,242,500
			250 orang	➤ <i>Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan</i>	47,457,500
				Program : Pendidikan Politik Masyarakat	163,580,000
				Kegiatan : <i>Penyuluhan Kepada Masyarakat</i>	21,787,500
				<i>Penyusunan Database Parpol</i>	19,243,300
				<i>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</i>	122,549,200

BAB III AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai tahun 2019 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kejadiannya itu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (*input*), Keluaran (*output*), dan Hasil (*outcome*) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
3. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (*target*) yang kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara *target* dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja) .

Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan maka capaian dimaksud dibagi atas 5 (lima) kategori seperti berikut:

TABEL 7

KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

No.	Capaian Kinerja	Kategori/ Makna
1.	≥ 100	Memuaskan
2.	$\geq 85 - 99$	Sangat Baik
3.	$\geq 70 - 84$	Baik

4.	$\geq 50 - 69$	Cukup
5.	≤ 49	Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2019, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2019 untuk mencapai 2 sasaran strategis.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 66,25% dengan kategori “**Cukup**”.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai tahun 2019 tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 :

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 4 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti Nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran kinerja Tahun 2019 yang diperbandingan dengan pengukuran kinerja tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018.

Analisis capaian indikator untuk sasaran pertama dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

TABEL 8

ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

No	IndikatorSasaran	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12	18	150 %	12	12	100%	12	14	116,66%	12	12	100%
2	Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)	45	28	62%	33	30	90,9%	30	23	76,66%	30	36	120%
	Rata-rata			106 %			95,45 %			96,66%			110%
	Kategori										Memuaskan		

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 110% dengan kategori **Memuaskan**. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 106% menjadi 95,45% pada tahun 2017; Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 (95,45%) pada tahun 2018 (96,66%) dan pada tahun 2019 sebesar 110%. Peningkatan yang terjadi pada umumnya didominasi oleh kasus tanah di wilayah Kabupaten Manggarai.

Uraian masing-masing indikator sebagai berikut.

Indikator pada sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

a. **Kasus yang dimediasi penyelesaiannya.**

Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% dengan kategori Memuaskan dan dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 116,66% juga dengan kategori memuaskan. Selama tahun 2019, Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai telah menangani kasus dengan jumlah 12 kasus dari target 12 kasus tahun 2019 dengan rincian seperti tertera pada table 9 berikut:

TABEL 9
KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH

NO	TANGGAL	JENIS MASALAH	HASIL AKHIR
1.	Senin 14 Januari 2019	Bertempat di kantor Badan Kesbang Pol Manggarai kedatangan 15 orang masyarakat dari Kampung Nggorong Desa Beo Rahong Kecamatan Ruteng datang melapor terkait ancaman fisik yang dialami ibu-ibu dari Nggorong oleh warga gendang Nderu Rahong saat melakukan aktivitas di kebun mereka di lingko Lalang Desa Beo Rahong; selain ancaman fisik juga tanaman perkebunan mereka seperti Cengkeh, dll dirusak. Kedatangan masyarakat kampung Nggorong di mediasi oleh JPIC Keuskupan Ruteng an Pater Simon Suban Tukan, SVD.	Kaban KesbangPol mengucapkan terimakasih atas kehadiran mereka juga atas kehadiran pater Simon. Laporan Bapak/ibu akan kami tindak lanjuti dan kami laporkan secara berjenjang. Meminta kepada masyarakat Dusun Nggorong untuk tidak mudah terprovokasi oleh oknum tertentu. Pak Kaban berjanji akan mengatur waktu berkunjung kelokasi, dan pada tanggal 26 Februari 2019, Kaban KesbangPol berkunjung kelokasi untuk melakukan pendekatan dengan para tua Gendang kedua gendang yang bermasalah. Situasi sementara terpantau aman dan kondusif.
2.	Rabu, 23 Januari 2019	Telah dilakukan mediasi penyelesaian masalah tanah Sekolah SMK Negeri 1 Wae Rii di Kenda, antara tua Gendang Kenda vs Kepala Sekolah, dalam mediasi ini dilakukan sebanyak 3	Pada tanggal 23 Januari 2019 pertemuan dengan para guru dan Komite sekolah di SMKN I WaeRii di Kenda guna menghimpun informasi dan apa yang menjadi kehendak

		<p>kali, pertama di sekolah pada tanggal 26 Januari 2019, kedua di rumah Tua Gendang Kenda pada tanggal 26 Januari 2019, ketiga di Kantor Badan KesbangPol sekaligus diikuti pembuatan Berita Acara Perdamaian antara pihak Gendang Kenda dengan Pihak Sekolah SMKN I Wae Rii di Kenda.</p>	<p>sekolah.</p> <p>Pada tanggal 26 Januari 2019, diadakan rapat dengan para pemuka masyarakat Kenda bersama Tuga Gendang kenda juga dengan maksud yang sama, menggali informasi.</p> <p>Pada tanggal 2019, bertempat di Kantor Badan KesbangPol Kab. Manggarai dilaksanakan acara perdamaian antara Pihak sekolah dengan Tua Gendang Kenda dengan ditandatangani bersama Berita Acara Perdamaian yang disaksikan Kaban KesbangPol.</p> <p>Situasi Terantau aman dan Kondusif</p>
3.	18 Januari 2019	<p>Telah dilakukan mediasi yang diakhiri dengan dilaksanakan penandatanganan Berita Acara penyelesaian masalah Tanah SDI Barang dan SMPN 5 Cibal bertempat di Kantor Desa Pinggang Kec. Cibal antara Pihak Sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah SDI Barang dengan bapak Nobertus Kade (terlapor), masalah ini terjadi pada tanggal 23 Nopember 2018 berdasarkan surat kepala sekolah SDI Barang kepada Camat Cibal perihal Penyelesaian Tanah SDI Barang.</p>	<p>Pada tanggal 6 Desember 2018 bertempat di kantor Camat Cibal, oleh Camat dilakukan mediasi penyelesaian masalah, Tanggal 13 Desember 2018, dilakukan peninjauan lokasi yang menjadi masalah oleh MUSPIKA Kec. Cibal.</p> <p>Tanggal 19 Desember 2018, bertempat di Kantor Camat Cibal, dilakukan mediasi ketiga. Ikut hadir staf dari Badan KesbangPol.</p> <p>Pada tanggal 18 Januari 2019, dicapai kata sepakat perdamaian dengan ditandatangani Berita Acara Perdamaian</p>

			dari para pihak dan masyarakat. Pada tanggal 21 Januari 2019 Camat Cibal kembali mengeluarkan peringatan keras bagi saudara Nobertus Kade,dkk untuk tidak melakukan aktivitas di tanah sekolah. Situasi sementara terpantau kondusif.
4.	Senin, 14 Januari 2019	Mediasi penyelesaian masalah tanah antara Tua Adat kampung Gangkas dengan saudara Agustinus San oleh Camat Cibal Barat, dimana masalah ini awalnya dimediasi oleh Kepala Desa Golo Lanak namun tidak menemukan kata sepakat akhirnya dimediasi oleh Camat pada tanggal 14 Januari 2019 dan langsung meninjau lokasih di lingko Paco dan lingko Mencil, mediasi dilakukan 3 x yakni kedua pada tanggal 25 Februari 2019, dan ketiga pada tanggal 4 Maret 2019 bertempat di kantor Camat.	Pada tanggal 14 Januari 2019 di lokasi tanah masalah, Camat Cibal Barat melakukan mediasi penyelesaian sengketa batas tanah (KEPER) antara Tua Adat Kampung Gangkas vs Agustinus San, ikut hadir tua-tua adat kampung Gangkas, Tua adat yang membagi tanah, saksi-saksi batas tanah dan masyarakat yang mengetahui persis tanah tersebut/ Situasi sementara kondusif.
5.	22 Februari 2019	Penyelesaian masalah tanah di lingko Bowohocu di Desa Bulan Kecamatan Ruteng, antara Ahli Waris Kraeng Teok VS Tua Gendang Anam yang terjadi sejak tahun 2018, dan masalah ini sudah berkali kali dimediasi oleh pemerintah baik Pemerintah Desa, Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten	Hasilnya, pada tanggal 22 Februari 2019, Bupati Manggarai mengeluarkan Draf Rekomendasi Tim Penanganan sengketa tanah berbasis adat untuk dicermati oleh Tua Gendang Anam dan meminta tanggapannya kepada Pemda Kab. Manggarai paling lambat 7 hari terhitung sejak surat ini diterima oleh

		dengan menghadirkan semua pihak di Kantor Bupati Manggarai yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Manggarai beserta OPD yang tergabung dalam Tim penyelesaian Konflik Tanah dan FORKOMPIMDA, namun mediasi inibelumsepenuhnyaditerima oleh keduabelahpihak.	Tua Gendang Anam. Situasi Kantrantibmas sementara kondusif, namun terus dalam pengawasan pihak Polres Manggarai.
6.	5 Maret 2019	Penyelesaian masalah tanah antara sdr Falentinus Domon alamat kampung Pateng desa Latung VS sdr Simon Jememat warga kampung Ponto desa Wae Renca yang berlokasi di Bea Runu, Desa Latung	Mediasi masalah dilakukan oleh Camat Cibai Barat bersama Kepala Desa Latung dan Forkompimcam berlokasi di Kantor Camat. Situasi sementara terpantau kondusif.
7.	25 Januari 2019	Penyelesaian masalah tanah antara sdr Rofinus Manggut VS sdr Marta Unet di Lingko Bangka Ruma.	Mediasi masalah dilakukan oleh Camat Cibai bersama Forkompimcam berlokasi di Kantor Camat. Telah menemui kata sepakat dan tandatangan Berita Acara Perdamaian. (tuntas). Situasi terpantau aman dan kondusif.
8.	6 Maret 2019	Penyelesaian masalah kontrak pakai tanah dan gedung eks kantor Golkar terletak di jalan Motang Rua Kelurahan Mbau MukuKec. Langke Rembong oleh sdr. Andreas Doko tuan Toko Gloria-Ruteng.	Rapat dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 6 Maret 2019 bertempat di ruang rapat Ulumbu kantor Bupati, rapat di pimpin oleh Asisten I Setda Kab. Manggarai bersama OPD yang tergabung dalam Tim Penyelesaian Masalah Tanah Kab. Manggarai.

			Situasi terpantau aman dan kondusif.
9.	2 Juli 2019	Penyelesaian masalah tanah ulayat antara warga Gendang Nampo (GoloWoi) VS warga Gendang Lenggo (Meda) desa Golo Woi yang sudah berlangsung sejak tahun 23 Maret 2015.	<p>Masalah tanah tersebut sudah dilakukan mediasi berkali-kali sejak tahun 2015 s/d tahun 2019, dan mediasi terakhir tanggal 23 Mei 2019 ,hasilnya member ruang Gendang Nampo untuk mendaftar ke Pengadilan Negeri Ruteng dan diberi batas wtu 30 hari sejak tanggal pendaftaran dan member kesempatan Gendang Lenggo untuk menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Ruteng sd tanggal 26 Juni 2019.</p> <p>Mengingat batas waktu yang telah ditetapkan tidak ada gugatan balik dari Gendang Lenggo, maka berdasarkan surat Penjabat Sekretaris Daerah nomor Pem.130/108/VII/ 2019 tanggal 2 Juli 2019 perihal Undangan menghadiri pembagian tanah Lingko (tenteteno), yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019 di tanah Lingko Golo Woi.</p> <p>Situasi Kantrantibmas terpantau aman dan kondusif.</p>
10.	29 Maret 2019	Penyelesaian masalah tanah SDI Ngorang dan tanah Gereja Stasi Nggorang yang telah diserahkan oleh 3 (tigaTua) yang mewakili 3 anak kampung yaitu: Mbawar, Mondo dan Wae	<p>Pada tanggal 29 – 30 Maret 2019 atas nama Bupati Manggarai, Asisten I Setda Manggarai bersama Kaban KesbangPol, Camat Reok dan Tim Penanganan Masalah</p>

		Pesi, ke Pemerintah Kecamatan Reok pada tahun 1979, dan masalah ini mencuat ketika dibangunnya stadion mini di bagian utara Gereja Nggorang oleh Pemerintah Desa Bajak pada tahun 2018, Tua adat Gendang Mbawar an. Mateus Acak,dkk dan sdr. Ladislaus Atu, mantan Kades Bajak, menggugat pembangunan tersebut yang berimbas pada tanah Gereja stasi Nggorang dan tanah SDI Nggorang.	Tanah TK. Kab. Manggarai melakukan mediasi penyelesaian masalah tanah tersebut bertempat di Kantor Desa Bajak, Kec. Reok. Situasi Kantrantibmas sementara terpantau aman dan kondusif.
11.	15 Nopember 2019	Penyelesaian masalah tanah antara saudari Berta Mil VS saudara Sabinus Kantur di Lingko Belang Lesa Desa Persiapan Bangka Wela Kec. Ruteng, mediasi dilakukan di Kantor Camat Ruteng dengan menghadirkan semua saksi-saksi batas tanah dan tua-tua, yang didahului dengan peninjauan lapangan.	Hasilnya Camat Ruteng menyarankan agar batas tanah tersebut diukur kembali untuk memastikan luas yang sebenarnya sesuai awal mula pembagian/ penyerahannya, namun saudari Berta Mil menolak pengukuran kembali, dan berjanji akan melanjutkan persoalan ini ke jalur hukum. Situasi terpantau aman dan kondusif.
12.	21 Agustus 2019	Penyelesaian kasus tindakan criminal terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh warga dri gendang Lenggo terhadap warga gendang Kina Nampo desa Golowoi yang berakibat terganggunya situasi kantrantibmas yang ditandai dengan siswa-siswi SMPN Wae Codi dan SMAN 2 Cibal khususnya siswa-siswa dari kampung Meda tidak mengikuti kegiatan	Kaban KesbangPol beserta staf Bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai dan OPD lainnya turun kelokasi bertempat di rumah gendang Kina Nampo, SMPN 1 Wae Codi dan SMAN 2 Cibal melakukan dialog dan diskusi dengan tokoh masyarakat, tua adat, tua gendang dan kepala desa, kepala sekolah dan guru-guru untuk menenangkan

		belajar mengajar di sekolah selama kurang lebih 2 minggu.	situasi dan memastikan situasi sekolah aman agar anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah dengan baik. Situasi terpantau aman dan kondusif.
--	--	---	--

b. Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup).

Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 120% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya sebesar 76,66%. Selama tahun 2019, Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Manggarai telah melakukan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dengan jumlah 36 PAMTUP dari target 30 PAMTUP dengan rincian sebagai berikut :

- PAMTUP Hari Raya Besar Nasional dan Hari Raya Besar keagamaan :
 1. Tahun Baru Masehi, 1 Januari 2019
 2. Tahun Baru Imlek 4 Februari 2019
 3. Hari Raya Nyepi, 12 Maret 2019
 4. Hari Raya Isra Miraj 1440 H 3 April 2019
 5. Pekan Suci Paskah 19 Maret s.d 21 April 2019
 6. Hari Buruh Internasional 1 Mei 2019
 7. Hari Raya Waisak, 19 Mei 2019
 8. Kenaikan Isa Almasih 29 Mei 2019
 9. Hari Raya Idul Fitri 1440 H, 5 – 6 Juni 2019
 10. Hari Raya Idul Adha 1440 H, 11 Agustus 2019
 11. Hari Raya HUT RI, 16,17 Agustus 2019.
 12. Tahun Baru Islam 1441 H, 1 September 2019
 13. Pelantikan Anggota DPRD periode 2019-2024 Kabupaten Manggarai, 2 September 2019
 14. Pelantikan Ketua dan wakil ketua DPRD periode 2019-2024 Kabupaten Manggarai, 1 Oktober 2019
 15. Hari Raya Maulud Nabi SAW, 9 Nopember 2019
 16. Hari Pahlawan, 10 Nopember 2019
 17. Hari lahir Pancasila, 1 Juni 2019
 18. Hari Raya Natal, 24, 25 Desember 2019
 19. Hari Tutup Tahun 2019, 30, 31 Desember 2019
- Data Demonstrasi/ aksi unjuk rasa tahun 2019
Demonstrasi yang terjadi pada tahun 2019 dapat dijelaskan pada table 10 berikut.

Tabel 10
LAPORAN DEMO/AKSI UNJUK RASA 2019

NO	TANGGAL	IDENTITAS PENDEMO	TUJUAN DEMO	KET
1.	3-5-2019	PMKRI DAN FMPD (Forum Masyarakat Peduli Demokrasi) dengan sasaran Kantor Bawaslu Manggarai dan KPU Manggarai.	Menuntut Pihak GAKUMDU (Kepolisian, Kejaksaan, Bawaslu) untuk mengusut dugaan Money Politik yang dilakukan oleh sdr. Hendrikus Abot di Desa Terong Kec. Satar Mese Barat	Aman & Kondusif
2.	18-5-2019	Demo dari masyarakat Desa Poco tentang TPA Sampah milik Pemkab Manggarai.	Menuntut Pemkab Manggarai untuk memindahkan tempat TPA karena dinilai tidak sesuai kesepakatan awal dengan masyarakat setempat, juga TPA menimbulkan bau busuk yang menganggu dan membuat masyarakat setempat terserang penyakit ISPA dan Gatal-gatal.	Sda
3.	7-8-2019	Demo dari APMB (Aliansi Petani Manggarai Baru) dengan sasaran Kantor DPRD Manggarai, KADIN Manggarai dan Kantor Pajak Pratama Ruteng.	Meminta Kadin dan Pemkab Manggarai turun tangan soal ditutupnya beberapa Usaha Dagang/Toko pembeli hasil pertanian masyarakat sebagai imbas dari diterapkannya aturan penerapan pajak 10 % oleh Kantor Pajak Pratama Ruteng.	Sda
4.	22-8-2019	Demo dari PMM (Penggerak Mahasiswa Manggarai) tentang sampah di Reo, dengan sasaran Kantor Camat Reok.	Meminta Pemkab Manggarai secepatnya menyediakan TPA sampah di Reo yang sangat meresahkan masyarakat.	Sda

5.	27-8-2019	Demo dari Masyarakat Kedindi Kelurahan Mata air dengan sasaran Pelabuhan Reo.	Memprotes polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan di tempat bongkar muat pelabuhan Reo.	Sda
6.	11-6-2019	Demo dari PMM (Penggerak Mahasiswa Manggarai) tentang sampah di Reo, dengan sasaran kantor Cadang PT Menara Armada Pratama.	Menuntut PT Menara Armada Pratama merealisasikan semua janji dan hasil kesepakatan dengan masyarakat desa Bajak, Kec. Reok	Sda
7.	5-9-2019	Demo dari GMNI dan PMII dengan sasaran Kantor DPRD Manggarai dan Kantor Polisi Resort Manggarai.	Menuntut Pemkab Manggarai bersama DPRD Manggarai menyuarakan aspirasi masyarakat Manggarai yang menolak upaya Papua untuk memisahkan diri dari NKRI.	Sda
8.	30-9-2019	Demo dari PMKRI Cabang Ruteng ,GMNI dan PMII dengan sasaran Kantor Bupati Manggarai, Polres Manggarai dan Kantor DPRD Manggarai	Menolak Revisi UU KPK oleh DPR RI, dan mendesak Presiden RI mengeluarkan PERPU tentang Pembatalan Revisi UU KPK oleh DPR RI	Sda
9.	26-11-2019	Demo dari LPPDM dengan sasaran Kantor Bupati, Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai dan Markas Polres Manggarai, tentang dugaan korupsi (KKN) proyek Embung Wae Kebong	Mendesak Kapolres Baru untuk menetapkan bapak Deno Kamelus (BupatiManggarai) mantan Kapolres Manggarai bapak Marselis S. Kerong dan mantan Kasat Reskrim Manggarai bapak Aldo untuk dijadikan tersangka kasus proyek Wae Kebong yang berlokasi di RTK 18 Cibal.	sda

		Kec. Cibal.		
10.	9-12-2019	Demo dari LPPDM dengan sasaran Kantor Bupati, Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai dan Markas Polres Manggarai, tentang dugaan korupsi (KKN) proyek Embung Wae Kebong Kec. Cibal.	Mendesak Polres Manggarai meninjau kembali di SP3nya kasus proyek Wae Kebong yang berlokasi di RTK 18 Cibal, yang diduga sarat KKN.	Sda
11.	11-3-2019	Demo dari OMS Desa Gulung Kecamatan SatarMese Barat di Kantor DPRD Manggarai, tentang tuntutan mereka terkait pengalihan proyek TA 2016 dari Kementrian Desa oleh Bupati Manggarai	Mendesak agar Proyek tersebut dikembalikan ke Desa Gulung Kec. Satar Mese Barat, sesuai SK menteri waktu itu, karena kami yang buat proposal minta ke Kemendes, kenapa Bupati alihkan ketempat lain.	Sda

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 1 dengan target anggaran Rp. 530,899,800,- dan realisasinya Rp. 514,424,100,- (96,90%).

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

TABEL 11

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2019 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 1
MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN DIALOG YANG KONSTRUKTIF ANTARA ANGGOTA
MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DEMI MENJAGA
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12	12	100%
Jumlah Pengamanan Tertutup	36	30	120%
Rata-Rata			110%
Kategori	MEMUASKAN		

2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Adapun akuntabilitas sasaran I dapat dijelaskan pada Tabel 12 berikut ini :

TABEL 12

AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sasaran1 : <i>Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</i>	Rp. 530,899,800	Rp. 514,424,100	96,90%
Program : 1. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rp.157.029.400.	Rp.147.078.200	93,66%
Kegiatan : 1.1.Penguatan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat.	Rp.157.029.400.	Rp.147.078.200	93,66%

Program :			
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 373,870,400	Rp. 367,345,900	98,25%
Kegiatan :			
2.1 Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 278,872,000	Rp. 272,347,500	97,66%
2.2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 77.409.000	Rp. 77.409.000	100%
2.3 Pemantauan dan Pengamanan Aktivitas Orang Asing dan Lembaga Asing	Rp. 17,589,400	Rp 17,589,400	100%

Sasaran 2 :

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.

Dalam usaha mencapai sasaran, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai menetapkan 2 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 6 kegiatan dengan 1 indikator kinerja pencapaian sasaran.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2019 yang diperbandingkan pengukuran kinerja tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018.

Analisis capaian kinerja indikator sasaran kedua dapat dilihat pada tabel 13 berikut :

TABEL 13

**ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN
PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA**

No.	IndikatorSasaran	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Targe t	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat	1.200 orang	1.200 orang	100 %	700 orang	700 orang	100 %	600 org	472	78,66 %	600 orang	150 orang	25%

	pendidikan wawasan kebangsaan												
2.	Jumlah peserta sosialisasi politik, Undang-Undang Politik dan HAM.	300 orang	300 orang	100 %	200 orang	200 orang	100 %	250 org	200	80%	250 orang	50 orang	20%
	Rata-rata			100 %			100 %			79,33 %			22,50 %
	Kategori												Kurang

ata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 22,50% dengan kategori **Kurang**. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mencapai target 100%, maka terlihat bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan capaian kinerja masing-masing 79,33 % pada tahun 2018 dan 22,50% pada tahun 2019.

Uraian kegiatan untuk masing-masing indikator sebagai berikut. Indikator pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator sasaran yaitu:

- a. Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan sosialisasi sebanyak 3 jenis dengan jumlah peserta 150 orang. Kegiatan sosialisasi meliputi: 1. Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama; 2. Sosialisasi penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan; dan 3. Sosialisasi rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat. Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 25 % dengan kategori **Kurang** dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018. Uraian kegiatan ini sebagai berikut:
 - Sosialisasi tentang Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama sebanyak 1 kali di Kecamatan Reok dengan jumlah peserta 50 orang;
 - Sosialisasi tentang peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat sebanyak 1 kali di Kecamatan Satarmese dengan jumlah peserta 50 orang;
 - Sosialisasi Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan sebanyak 1 kali di Kecamatan Ruteng dengan jumlah peserta 50 orang.
- b. Jumlah peserta sosialisasi politik/ penyuluhan, Undang-Undang Politik dan HAM. Kegiatan yang dilaksanakan berupa kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Politik dan HAM di Kecamatan Ruteng sebanyak 1 kali dan jumlah peserta 50 orang. Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 20% dengan kategori **Kurang**.

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 2 dengan target anggaran Rp. **425,090,400,-** dan realisasinya Rp. **417,664,500,-** (98,25%).

Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 14 berikut :

TABEL 14

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2019 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 2
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRATIS (PILPRES, PILKADA,
PILEG) DAN KESADARANWARGA NEGARA DALAM BERPARTISIPASI POLITIK**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2019	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	150	600	25%
Jumlah peserta sosialisasi politik/ penyuluhan, Undang-Undang Politik dan HAM	50	250	20%
Rata-Rata			22,50%
Kategori	KURANG		

2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2

Adapun akuntabilitas sasaran 2 dapat dijelaskan pada Tabel 15 berikut ini :

TABEL 15

AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 2

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sasaran2 : <i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik</i>	Rp.425,090,400	Rp. 417,664,500	98,25%
Program : 1. Pengembangan wawasan kebangsaan	Rp.261,510,400	Rp.254,359,500	97,27%
Kegiatan :			
1.1 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Rp.136,810,400	Rp. 130,334,500	95,27%
1.2 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Rp. 77,242,500	Rp. 76,842,500	99,48%
1.3 Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Rp. 47,457,500	Rp. 47,182,500	99,42%

Program :			
2. Pendidikan politik masyarakat	Rp.163,580,000	Rp. 163,305,000	99,83%
Kegiatan :			
2.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat	Rp.21,787,500	Rp.21,512,500	98,74%
2.2 Penyusunan Database Partai Politik	Rp.19,243,300	Rp.19,243,300	100%
2.3 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Rp.122,549,200	Rp.122,549,200	100%

Dari Kedua sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Total capaian dari kedua indikator sasaran adalah 66,25% dengan kategori Cukup. Hal Ini dapat di lihat pada tabel 16 di bawah ini :

TABEL 16
TOTAL HASIL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 kasus 30 kali	12 kasus 36 kali	100% 120%
		1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)			
		Rata-Rata			110%
		Kategori	Memuaskan		
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa	600 Orang	150 orang	25%
		2.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM	250 Orang	50 orang	20%
		Rata-Rata			22,50%
		Kategori	Kurang		
	Total			66,25%	
	Kategori	Cukup			

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai merupakan tindaklanjut atau respon terhadap Permenpan Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Manggarai pada tahun 2019 menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapaisesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021. Dua sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran I Program Kegiatan Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 110 % dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Program Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 25 % dengan kategori “kurang” dengan total rata-rata kedua sasaran adalah **66,25% dengan kategori ‘cukup’**. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan peserta kegiatan sosialisasi 4 kegiatan di 4 kecamatan yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan jumlah peserta kegiatan sosialisasi yang lebih banyak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruteng, Januari 2020

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN MANGGARAI, 



HERMANSYAH GABUT, SH

PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C

NIP. 19620704 199202 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Manggarai

Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan	Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	12 kasus 30 kali
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	Jumlah peserta Sosialisasi Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, sosialisasi rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM	600 Orang (6 Kali Kegiatan) 250 Orang (5 Kali Kegiatan)

Ruteng, 7 Januari 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN MANGGARAI,



HERMANSYAH MANGABUT, SH

PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C

NIP. 19620704 199202 1 001

**MATRIKS RENCANA STRATEGIK
BADAN KESBANG, POL DAN
LINMAS KABUPATEN
MANGGARAI
TAHUN 2016 -
2021**

Instansi : Badan Kesbang, Pol. dan Linmas
Visi : Masyarakat Manggarai yang Tertib, Aman, Damai dan Kehidupan Berpolitik yang Demokratis
Misi : 1. Mewujudkan situasi keamanan yang kondusif
2. Mewujudkan Iklim Politik yang demokratis
3. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat

Tujuan	Sasaran		Target 2016						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggungjawab
	Uraian	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1.1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1.1.1. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	1.1.1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	12 kasus	Kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, satuan perlindungan masyarakat dalam melakukan pengamanan dilokasi konflik dan pelaksanaan Pemilu	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Bidang PMA
		1.1.1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	45 kali	33 kali	30 kali	30 kali	30 kali	30 kali		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
		1.1.1.3. Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)	6 kali	0	0	0	0	0			
2.1. Terciptanya kualitas penyelenggaraan demokratis dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PiPres, PiKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	2.1.1.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12 kali 1.200 Peserta	7 kali 700 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	1. Memberikan informasi permasalahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 2. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Penguatan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK)	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Bidang Demokratisasi
		2.1.1.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan Ha-hak Asasi Manusia (HAM)	300 orang	200 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang		1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 2. Pembinaan terhadap organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	

Ruteng, Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN MANGGARAI**



PEMBAHUT, SH
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C
NIP. 19620704 199202 1 001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Manggarai
Tahun : 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan	Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	12 kasus 30 kali
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	Jumlah peserta Sosialisasi Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama, sosialisasi rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat, dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan pendidikan wawasan kebangsaan Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM	600 Orang (6 Kali Kegiatan) 250 Orang (5 Kali Kegiatan)

Ruteng, Januari 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 * KABUPATEN MANGGARAI, 

PEMBAHASES V. GABUT, SH
 PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C
 NIP. 19620704 199202 1 001

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Manggarai
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan	1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya 1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	12 kasus 30 kali	12 kasus 36 kali	100% 120%
		Rata-Rata			110%
		Kategori		Memuaskan	
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa 2.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM	600 Orang 250 Orang	150 orang 50 orang	25% 20%
		Rata-Rata			22,50%
		Kategori		Kurang	
		Total			66,25%
		Kategori		Cukup	

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 373.870.400	DAU APBD II
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp. 261.510.400	DAU APBD II
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban & Keamanan	Rp. 157.029.400	DAU APBD II
4. Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 163.580.000	DAU APBD II
Jumlah Anggaran Rp.		955.990.200

Ruteng, 31 Desember 2019

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
 *
MANGGARAI

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI, SH
PEMBINA UTAMA MUDA-IV/C
NIP. 19620704 199202 1 001